

RESPONSIF GENDER

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DAN

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**


GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2022
Program : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

PROGRAM	
KODE PROGRAM	2.15.02.2.06.05
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan - Tugas Forum LLAJ sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memeritukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah – masalah lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Mewujudkan kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, tertib, teratur dan selamat. 3. Mensinergikan program dan kegiatan antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. 4. Memfasilitasi, membantu memberikan solusi dan mendorong penyelesaian masalah lalu lintas dan angkutan jalan melalui musyawarah untuk mufakat. 5. Mengadakan rapat bulanan dan tiga bulanan dan/atau sesuai kebutuhan forum untuk memantapkan koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul disetiap penyelenggara serta mencari jalan keluar secara proposional dan bertanggungjawab. 6. Mensinergikan program dan kegiatan antar instansi penyelenggara LLAJ serta ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrebang). 7. Menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas angkutan jalan, registrasi kendaraan bermotor. 8. Menyediakan informasi kepada publik terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 9. Melakukan konsultasi publik melalui media masa untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat. 10. Melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ. - Asas pelayanan FLLAJ adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi : Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; 2. Akuntabilitas : Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Kondisional Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas; 4. Partisipatif : Mendorong partisipasi masyarakat; 5. Kesamaan hak : Tidak membedakan status sosial ekonomi, kedudukan, pangkat, suku, ras, agama, golongan dan gender;

	<p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p><u>Alasan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruas jalan yang kecil dan sempit. - Tingkat pertumbuhan kendaraan yang tinggi - Minimnya Perlengkapan Jalan <p><u>Kontrol</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan terhadap jalan dan perlengkapan jalan <p><u>Manfaat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya pelayanan yang dilakukan sehingga masih kurang dapat dirasakan pengaruhnya bagi pengguna jalan <p><u>Partisipasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya peran serta kelompok masyarakat dalam menentukan kebijakan <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Fasilitas Pendukung - Kurangnya pengawasan terhadap jalan dan perlengkapan jalan <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pertumbuhan kendaraan yang tinggi - Kurangnya peran serta kelompok masyarakat dalam menentukan kebijakan 	
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
	2. Indikator dan Target Kinerja Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 19.505.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus lima juta rupiah)	
RENCANA AKSI	Kegiatan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan : Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
		Masukan Rp. 750.000.000,-
		Keluaran Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
	Hasil	Tersedianya Jalan Yang Layak dan Terpenuhinya Perlengkapan Jalan

Painan, 22 Juni 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


GUNAWAN, S. Sos, M.Si
NIP. 197007041991011002

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Hasil Verifikasi

SKPD : Dinas Perhubungan

Tahun : 2022

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PENGUKURAN HASIL								
PROGRAM : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Akses: - Ruas jalan yang kecil dan sempit - Tingkat pertumbuhan kendaraan yang tinggi - Minimnya Pertangkapan Jalan	- Kurangnya Fasilitas Pendukung - Kurangnya pengawasan terhadap jalan dan perlengkapan jalan	- Tingkat pertumbuhan kendaraan yang tinggi - Kurangnya peran serta kelompok masyarakat dalam menentukan kebijakan	Hakekat pelayanan Forum LLAJ adalah memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat secara cepat, tepat sasaran, serta tepat guna tentang lalu lintas dan angkutan jalan	- Rapat - Sosialisasi - Studi banding - Survey - Konsultasi dan Koordinasi - Monitoring dan Evaluasi	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Sub Kegiatan: Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Input : Rp. 750.000.000,- Output : Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Outcome : Tersedianya Jalan Yang Layak dan Terperluhunya Pertengkapannya Jalan
KEGIATAN: Pelaksanaan Manajemen dan Rekrayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Kontrol - Kurangnya pengawasan terhadap jalan dan perlengkapan jalan						
SUB KEGIATAN : Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Manfaat - Belum maksimalnya pelayanan yang dilakukan sehingga masih kurang dapat dirasakan penganutnya bagi pengguna jalan Partisipasi - Kurangnya peran serta kelompok masyarakat dalam menentukan kebijakan						

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	<p>- Tugas Forum LLAJ sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi antar penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah – masalah lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Mewujudkan kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, tertib, teratur dan selamat. 3. Mensinergikan program dan kegiatan antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan 							

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	<p>jalan.</p> <p>4. Memfasilitasi, membantu memberikan solusi dan mendorong penyelesaian masalah lalu lintas dan angkutan jalan melalui musyawarah untuk mufakat.</p> <p>5. Mengadakan rapat bulanan dan tiga bulanan dan/atau sesuai kebutuhan forum untuk memantapkan koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul disetiap penyelenggara serta menarikan jalan keluar secara proposional dan bertanggungjawab.</p>							

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	ISU GENDER Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	<p>6. Mensinergikan program dan kegiatan antar instansi penyelenggara LLAJ serta ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrembang).</p> <p>7. Menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas angkutan jalan, registrasi kendaraan bermotor.</p> <p>8. Menyediakan informasi kepada publik terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>9. Melakukan konsultasi publik</p>							

Langkah 1 Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Langkah 2 Data Pembuka Wawasan	Langkah 3		Langkah 4		Langkah 5		Langkah 6		Langkah 7		Langkah 8		Langkah 9
		Faktor Kesenjangan	ISU GENDER	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja					
	<p>melalui media masa untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat.</p> <p>10. Melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.</p> <p>11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur NTT</p> <p>- Asas pelayanan FLLAJ adalah:</p> <p>1. Transparansi : Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan</p>													

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
 Tahun Anggaran : 2022
 Program : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 Kegiatan : Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

PROGRAM													
KODE PROGRAM	2.15.02.2.02.01												
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan sudah tersedia sebanyak 25 halte yang tersebar di 15 Kecamatan - Belum tersedianya halte yang dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat menyusui serta jalur khusus bagi penyandang disabilitas <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p><u>Akses:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih belum memadainya fasilitas dan utilitas penunjang pada setiap lokasi halte - Lokasi halte belum memenuhi kebutuhan kantong-kantong penumpang - Perilaku pengendara yang menaik dan menurunkan penumpang tidak pada lokasi halte yang tersedia - Perilaku calon penumpang yang tidak menunggu kendaraan angkutan pada lokasi halte yang tersedia - Belum tersedianya halte yang dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat menyusui serta jalur Khusus bagi penyandang disabilitas <p><u>Kontrol</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan halte <p><u>Manfaat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat akan manfaat Halte <p><u>Partisipasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Peran serta masyarakat dalam pembangunan halte <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan halte <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perilaku pengendara yang menaik dan menurunkan penumpang tidak pada lokasi halte yang tersedia - Perilaku calon penumpang yang tidak menunggu angkutan umum pada lokasi halte yang tersedia 												
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p>												
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 19.505.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus lima juta rupiah)												
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Kegiatan</td> <td colspan="2">Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sub Kegiatan : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</td> </tr> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp. 300.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Terlaksananya Pembangunan Halte</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td colspan="2">Terpenuhinya Kebutuhan masyarakat akan halte yang memadai</td> </tr> </table>	Kegiatan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Sub Kegiatan : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Masukan	Rp. 300.000.000,-	Keluaran	Terlaksananya Pembangunan Halte	Hasil	Terpenuhinya Kebutuhan masyarakat akan halte yang memadai	
Kegiatan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota												
	Sub Kegiatan : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota												
	Masukan		Rp. 300.000.000,-										
	Keluaran	Terlaksananya Pembangunan Halte											
Hasil	Terpenuhinya Kebutuhan masyarakat akan halte yang memadai												

Painan, 22 Juni 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

GUNAWAN S.Sos, M.Si
NIP. 19700204 199101 1 002

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Hasil Verifikasi

SKPD : Dinas Perhubungan

Tahun : 2022

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>PROGRAM : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <p>KEGIATAN: Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>TUJUAN: Terpenuhi Kebutuhan masyarakat akan halte yang memadai</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan sudah tersedia sebanyak 25 halte yang tersebar di 15 Kecamatan - Belum tersedianya halte yang dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat menyusui serta jalur khusus bagi penyandang disabilitas 	<p>Akses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih belum memadainya fasilitas dan utilitas penunjang pada setiap lokasi halte - Lokasi halte belum memenuhi kebutuhan kantong-kantong penunjang - Perilaku pengendara yang menaik dan menurunkan penunjang tidak pada lokasi halte yang tersedia - Perilaku calon penunjang yang tidak menunggu angkutan umum pada lokasi halte yang tersedia - Belum tersedianya halte yang dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat menyusui serta jalur khusus bagi penyandang disabilitas <p>Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemenuhan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan halte - Kebutuhan masyarakat akan halte 	<ul style="list-style-type: none"> - Perilaku pengendara yang menaik dan menurunkan penunjang tidak pada lokasi halte yang tersedia - Perilaku calon penunjang yang tidak menunggu angkutan umum pada lokasi halte yang tersedia 	Terpuhinya Kebutuhan masyarakat akan halte yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat - Koordinasi - Survey - Pelaksanaan pembangunan halte - Monitoring 	Saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan sudah tersedia sebanyak 25 halte yang tersebar di 15 Kecamatan	Sub Kegiatan: Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Input : Rp. 300.000.000,- Output : Terlaksananya Pembangunan Halte Outcome : Terpuhinya Kebutuhan masyarakat akan halte yang memadai

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan kebutuhan masyarakat akan halte <u>Manfaat</u> - Belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat akan manfaat Halte <u>Partisipasi</u> - Peran serta masyarakat dalam pembangunan halte	ISU GENDER Sebab Kesenjangan Internal		Sebab Kesenjangan Eksternal		KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN Reformulasi Tujuan	
			Rencana Aksi		Basis Data (Base-Line)		PENGUKURAN HASIL Indikator Kinerja	

Painan, 22 Juni 2021
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

GUNAWAN, S.Sos., M.Si
 NIP. 197002041991011002

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

Opd : Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
 Tahun Anggaran : 2022
 Program : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
 Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota

PROGRAM										
KODE PROGRAM	1.02.09.1.02.09.01.17.									
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 tahun 2014 Tentang Rambu lalu Lintas - Rambu lalu lintas merupakan salah satu dari perlengkapan jalan yang dapat berupa lambang, huruf, angka, kalimat atau perpaduan di antaranya yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan - Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p><u>Akses:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih minimnya alat keselamatan lalu lintas seperti rambu rambu lalu lintas, warning light, Zoss dan Marka Jalan <p><u>Kontrol</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang pengawasan terhadap alat keselamatan yang sudah terpasang <p><u>Manfaat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Seringnya terjadi kecelakaan disebabkan minimnya alat keselamatan lalu lintas <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak tersedianya anggaran dalam pengadaan alat keselamatan lalu lintas - Minimnya warning light di persimpangan yang rawan kecelakaan - Banyaknya rambu lalu lintas yang sudah rusak - Tidak adanya penyediaan Zoss (Zona Selamat Sekolah) dan Marka Jalan. <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya angka kecelakaan setiap tahun - Banyaknya permintaan alat keselamatan lalu lintas pada saat pelaksanaan Musrenbang - Adanya permintaan penyediaan Zoss di area sekolah 									
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja Persentase Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas</p>									
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 14.729.400.000,- (empat belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)									
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Kegiatan</td> <td colspan="2">Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas</td> </tr> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp. 2.879.400.000,-</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Tersedianya alat keselamatan lalu lintas dalam menekan angka kecelakaan</td> </tr> </table>	Kegiatan	Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas		Masukan	Rp. 2.879.400.000,-	Keluaran	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas	Hasil	Tersedianya alat keselamatan lalu lintas dalam menekan angka kecelakaan
Kegiatan	Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas									
	Masukan		Rp. 2.879.400.000,-							
	Keluaran		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas							
	Hasil	Tersedianya alat keselamatan lalu lintas dalam menekan angka kecelakaan								

Painan, 22 Juni 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700204-199101 1 002

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Hasil Verifikasi

SKPD : Dinas Perhubungan

Tahun : 2022

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>PROGRAM : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <p>KEGIATAN: Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota</p> <p>SUB KEGIATAN: Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota</p> <p>TUJUAN: Tersedianya alat keselamatan lalu lintas dalam menekan angka kecelakaan</p>	<p>- Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 tahun 2014 Tentang Rambu lalu Lintas</p> <p>- Rambu lalu lintas merupakan salah satu dari perlengkapan jalan yang dapat berupa lambang, huruf, angka, kalimat atau perpaduan di antaranya yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan</p> <p>- Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas</p>	<p>Akses:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih minimnya alat keselamatan lalu lintas seperti rambu lalu lintas, warning light, marka jalan dan Zoss <p>Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pengawasan terhadap alat keselamatan yang sudah terpasang <p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> Seringnya terjadi kecelakaan disebabkan minimnya alat keselamatan lalu lintas <p>Partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya disiplin pengguna jalan dalam menaati aturan lalu lintas yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tersedianya anggaran dalam pengadaan alat keselamatan lalu lintas Minimnya warning light di persimpangan yang rawan kecelakaan Banyaknya rambu lalu lintas yang sudah rusak Tidak adanya penyediaan Zoss (Zona Selamat Sekolah) dan Marka Jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya angka kecelakaan setiap tahun Banyaknya permintaan alat keselamatan lalu lintas pada saat pelaksanaan Musrenbang Adanya permintaan penyediaan Zoss di area sekolah 	<p>Tersedianya alat keselamatan lalu lintas dalam menekan angka kecelakaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pengadaan Alat Keselamatan Survey Lokasi Pemasangan Alat Keselamatan Penunjukkan Rekanan Pengadaan Suku Cadang Pelaksanaan Pemasangan Alat Keselamatan Serah Terima Hasil Pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Sampai saat ini rambu rambu yang ada pada aset dinas perhubungan tercatat sebanyak 948 buah Masih banyaknya sekolah-sekolah yang tidak ada Zoss. Kurangnya fasilitas keselamatan jalan. 	<p>Kegiatan: Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas</p> <p>Input : Rp. 2.879.400.000,-</p> <p>Output : Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas</p> <p>Outcome : Tersedianya alat keselamatan lalu lintas dalam menekan angka kecelakaan</p>

Painan, 22 Juni 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESIWAR SELATAN

GUNAWAN, S.Sos, M.Si

NIP. 197002041991011002